

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adioetomo, Sri Moertiningsih, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010).

Adi Subrata dan Winarna Surya, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2003).

Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama: 2004).

Effendi, Bachtiar, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, (Yogyakarta : Uhaiindo dan Offset, 2002)

Hartini, Sri, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).

Kristiono, Natal, *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2015.

Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004).

Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008)

Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Erlangga, 1992).

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Said, Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta : PT. Pustaka, 2012).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984).

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1982).

Sujanto. *Norma dan Etika Pengawasan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Sutedi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Terry, R George, *Prinsip-prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia), (Bandung : PT. Bumi Aksara, 2000).

Tjandra, riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu mengenai Pedoman Pengelolaan Uang Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015

Makalah, Jurnal dan Artikel.

Aminudin, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, ISSN: 2302-2019, *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*.

Budiyono, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, jurnal ilmu hukum : Fiat Justitia, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186.

Diamantina, Amalia, *Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 39 No. 1 2010, ISSN 2086-2695

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, (2017), *Publikasi*, diakses melalui <https://boyolalikab.bps.go.id/> pada tanggal 6 Februari 2018, Pukul 20:15 WIB.

Romi, *Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah*, (2016) diakses dari <https://ppknsmp123.blogspot.co.id/2016/03/apa-hak-dan-kewajiban-pemerintah-daerah.html> pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 15.20 WIB

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali, (2017), diakses melalui www.boyolali.go.id/ pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 02:18 WIB.

Website Resmi Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boyolali, (2017), diakses melalui www.bkp2d.boyolalikab.go.id/ pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 10.00 WIB

Website Resmi Dinas Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Boyolali, (2017), diakses melalui www.bpmptsp.boyolalikab.go.id/ pada tanggal 17 Februari 2018, pukul 21.20 WIB

Website Resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, (2017), diakses melalui www.disdukcapil.boyolalikab.go.id/ pada tanggal 5 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB

Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, (2017), diakses melalui www.dprdboyalali.com/ pada tanggal 2 februari 2018 pukul 11.00 WIB

Wawancara

Dwi Adi Agung Nugroho, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boyolali, wawancara tanggal 12 April 2018.

Irwan Sudadi S.H, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, wawancara tanggal 12 April 2018.

Titik, Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Kepala Sub Bagian Kerjasama dan OTDA, wawancara tanggal 16 April 2018.